

Judul : Kapal tak berfungsi, Senayan setuju penjualan Eks KRI
Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kapal Tak Berfungsi Senayan Setujui Penjualan Eks KRI

DPR menyetujui penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yulianti, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Awalnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto melaporkan proses pembahasan rapat Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara. Usai laporan, Dasco kemudian meminta persetujuan kepada seluruh anggota yang hadir.

"Apakah laporan Komisi I DPR tentang persetujuan terhadap penjualan barang-barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara 364 dapat disetujui?" tanya Dasco. "Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Dalam laporannya, Utut menjelaskan, persetujuan DPR diperlukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan tersebut mengatur pemindahtanganan barang milik negara dengan nilai tertentu, termasuk yang nilainya lebih dari Rp 100 miliar, memerlukan persetujuan DPR.

Komisi I DPR, kata Utut, tidak terlambat dalam menindaklanjuti permohonan tersebut. Karena surat Presiden mengenai permohonan persetujuan penjualan dikirim pada 22 Juli 2026 dan baru diteruskan untuk ditugaskan kepada Komisi I pada 21 Agustus 2026. Kemudian pada 27 Agustus sudah dijalankan atau dilakukan pembahasan.

"Setelah menerima penugasan, Komisi I langsung melakukan pembahasan," kata dia.

Selain itu, Utut menjelaskan eks KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal jenis korvet yang dibuat di Split, Yugoslavia, yang kini menjadi bagian dari Kroasia. Kapal tersebut memiliki panjang 96,7 meter dan lebar 11,2 meter, serta mampu menampung hingga 118 personel. "Yugoslavia sekarang sudah tidak ada di peta. Dari ngirim ini, 13 tahun kemudian sudah tidak ada di peta. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Republik yang kita cintai," harap dia.

Utut menambahkan, bobot mati kapal tersebut mencapai sekitar 2.080 ton. Saat ini, eks KRI Ki Hajar Dewantara berada di kawasan Semampir, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). "Informasi tambahan kapal ini separuh badannya bukan tenggelam, tapi ada di air di dermaga Ujung Semampir di Surabaya," kata politisi PDIP ini.

Sementara, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan, eks KRI Ki Hajar Dewantara kini sudah dalam kondisi tak layak. Kapal tersebut juga telah melewati masa pakai. Pada 2018, pihaknya juga telah melakukan pembongkaran senjata.

"Dengan kondisi itu kapal tidak lagi dapat difungsikan sebagai kapal perang dan tidak dapat digerakkan secara mandiri," ujar Donny di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Donny menjelaskan, eks KRI Ki Hajar Dewantara dipesan pada 1978 dan dibangun di galangan kapal Uljanik Shipyard di Split, dan sekarang menjadi wilayah Kroasia. Setelah sempat direncanakan untuk ditenggelamkan, kapal tersebut kini akan dijual. ■ TIF